

PERENCANAAN PEMBANGUNAN BERBASIS PARTISIPATIF DI KELURAHAN MARIO PULANA KECAMATAN CAMBA KABUPATEN MAROS

Yuniarti M. Ridwan^{1*}, Fatmawati², Samsir Rahim³

1. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
2. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
3. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

Abstract

The purpose of this study was to determine the implementation of participatory-based development planning in Mario Pulana Village, Camba District, Maros Regency. The type of research used is a qualitative research method with a descriptive type of research. Data collection techniques using observation, interviews and documentation. The results of this study show 3 (three) processes of implementing participatory-based development planning in Mario Pulana Village, Camba District, Maros Regency, namely: 1) Focusing on the Interest of the Community, namely that the fulfillment of all proposals given by the community through Musrenbang activities and Coordination Meetings, but coordination meetings are often not carried out by the Head of the Environment, 2) Participatory, that the involvement of the community in Mario Pulana Village, Camba District, Maros Regency has been active in providing suggestions, opinions, ideas and even providing energy/materials, but the presence of the community is still very little, and 3) Synergy, namely an agreement between the government and the community in accommodating aspirations given by the community by making two agreements, but there are still many proposals that cannot be fulfilled at the sub-district level.

Keywords: development planning, participatory

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pelaksanaan perencanaan pembangunan berbasis partisipatif di Kelurahan Mario Pulana Kecamatan Camba Kabupaten Maros. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan 3 (tiga) proses pelaksanaan perencanaan pembangunan berbasis partisipatif di Kelurahan Mario Pulana Kecamatan Camba Kabupaten Maros, yaitu: 1) Terfokus pada Kepentingan Masyarakat, bahwa terpenuhinya semua usulan yang diberikan masyarakat melalui kegiatan Musrenbang dan Rapat Koordinasi, namun rapat koordinasi seringkali tidak dilaksanakan oleh Kepala Lingkungan, 2) Partisipatif, bahwa keterlibatan masyarakat Kelurahan Mario Pulana Kecamatan Camba Kabupaten Maros sudah aktif memberikan saran, pendapat, ide bahkan memberikan tenaga/materi, namun kehadiran masyarakat sangat masih sedikit, dan 3) Sinergitas, bahwa adanya kesepakatan antara pemerintah dan masyarakat dalam menampung aspirasi yang diberikan masyarakat dengan membuat dua kesepakatan, namun masih banyak usulan yang tidak dapat terpenuhi di tingkat kecamatan.

Kata kunci: perencanaan pembangunan, partisipatif

* yuniartimridwan@gmail.com

PENDAHULUAN

Pembangunan adalah proses perubahan yang disadari dan terencana untuk mencapai kondisi yang lebih baik dan bermakna, dengan tujuan mencapai kemajuan sosial dan material termasuk bertambah besarnya keadilan dan kebebasan untuk mayoritas rakyat melalui kontrol yang lebih besar yang mereka dapatkan terhadap lingkungan mereka.

Dalam rangka membangun kehidupan bernegara dengan tingkat keragaman masyarakat yang tinggi, pemerintah telah menyusun Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Pasal 1 menyebutkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) ialah suatu kesatuan prosedur perencanaan pembangunan untuk penyusunan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Pembangunan itu sendiri memiliki tujuan yaitu mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Oleh karena itu, untuk mencapai keberhasilan pembangunan, banyak

aspek atau hal yang harus diperhatikan. Salah satunya adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan. Terutama pada tahap perencanaan yang merupakan tahap yang paling penting dari proses pembangunan, karena perencanaanlah yang sangat menentukan berhasil tidaknya pembangunan. Berdasarkan asumsi para ahli pembangunan, semakin tinggi perhatian atau keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, maka akan memberikan hasil yang lebih optimal. Perencanaan pembangunan berkonsep partisipatif berawal dari kepercayaan keberhasilan program-program yang ditetapkan oleh seluruh komitmen *stakeholder*.

Perencanaan partisipatif yang disusun oleh pemerintah daerah mengacu pada regulasi yang disusun oleh pemerintah pusat. Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang dimana dalam perencanaan pembangunan daerah, pemerintah daerah mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan jangka panjang daerah, perencanaan pembangunan jangka menengah daerah dan perencanaan pembangunan tahunan daerah.

Strategi yang dibangun oleh Pemerintah Kelurahan Mario Pulana Kecamatan Camba Kabupaten Maros dalam membangun Kelurahan Mario Pulana dengan melibatkan partisipasi masyarakat, merupakan upaya untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti, terdapat permasalahan yang terjadi seperti pada saat proses perumusan masalah, kegiatan identifikasi masalah di tingkat lingkungan Kelurahan jarang dilakukan, sehingga menghambat penemuan masalah terkait kebutuhan masyarakat di Kelurahan Mario Pulana Kecamatan Camba. Minimnya kehadiran masyarakat dalam kegiatan Musrenbang, hal ini sesuai pada daftar kehadiran yang ada masyarakat yang hadir hanya 9 orang. Padahal dengan kehadiran masyarakat ini sangat membantu dalam mengidentifikasi masalah yang ada, karena merekalah mengetahui permasalahan yang dihadapi.

Berdasarkan hasil wawancara pada 24 April 2021 dengan Kepala Lingkungan Mario Kelurahan Mario Pulana yang mempengaruhi kurangnya partisipasi dari masyarakat dalam perencanaan pembangunan, masyarakat berasumsi kalau proses pengambilan keputusan saat musyawarah ialah tugas pemerintah bukan tugas masyarakat.

Sehingga mereka menganggap bahwa tidak perlu banyak ikut campur dalam musyawarah tersebut. Selain itu permasalahan yang terjadi yaitu rata-rata mata pencarian masyarakat Kelurahan Mario Pulana sebagai petani yang membuat mereka tidak sempat ikut berpartisipasi dalam membahas perencanaan pembangunan.

Menurut Dolong (2016) perencanaan ialah proses yang terpadu dan dapat digunakan untuk menentukan tindakan yang akan diambil di masa yang akan datang. Perencanaan adalah kebijakan yang dijabarkan berdasarkan tindakan yang bermodel logis dari ilmu manajemen, kepemimpinan, administrasi, kebijakan publik, komunikasi dan teknologi yang bertujuan untuk mewujudkan visi dan misi organisasi. Tujuan adalah arah yang harus dicapai agar rencana dapat dirumuskan dan ditentukan dengan baik, sehingga tujuan perlu dirumuskan dalam bentuk tujuan yang jelas dan terukur. Dengan tujuan yang jelas ada target yang harus diraih. Kemudian dari target itulah selanjutnya menjadi fokus untuk menentukan langkah selanjutnya.

Perencanaan dilakukan terus menerus dan merupakan aktivitas yang tidak akan pernah selesai. Semua rencana yang bersifat sementara dan diganti apabila ada fakta atau variabel-

variabelnya perlu dinilai ulang. Rencana ini biasanya ditinjau secara teratur dan perubahan dibuat segera bila diperlukan untuk menghadapi situasi baru.

Karyoto (2016) mengemukakan terdapat lima tahapan-tahapan yang harus dilakukan saat melakukan perencanaan yakni: 1) Identifikasi dan perumusan masalah. Identifikasi ialah mendeskripsikan atau menjelaskan dari berbagai elemen dalam suatu objek tertentu. Variabel-variabel ini perlu di jelaskan satu per satu, karena dapat menimbulkan masalah atau mempengaruhi objek; 2) Pengumpulan data. Tujuan pengumpulan data adalah untuk mengumpulkan atau menyusun data yang dibutuhkan untuk mendukung realisasi keinginan di masa depan; 3) Melakukan analisa data. Dalam analisis data diperlukan prediksi yang akurat seperti ekonomi, sosial, politik, kebijakan pemerintah, pekerja, konsumen, dan pesaing di masa depan. Jika memiliki informasi ini, organisasi akan lebih mudah memprediksi situasinya sendiri di masa mendatang; 4) Penetapan sasaran. Sasaran ialah objek yang ditetapkan organisasi untuk dicapai. Untuk menetapkan sasaran, organisasi harus menggunakan beberapa variable yang dijelaskan dalam kegiatan identifikasi masalah. Karena terdapat banyak variabel maka organisasi perlu

memilih variabel yang dianggap paling penting untuk mencapai sasaran; dan 5) Penetapan strategi. Strategi ialah cara yang bisa dilakukan organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dari segi waktu, pekerjaan-pekerjaan yang dapat diterapkan pada struktur program kerja seperti program kerja jangka pendek dan program kerja jangka panjang.

Pembangunan sebagai serangkaian upaya terencana dan sadar untuk mencapai pertumbuhan dan perubahan, yang ditempuh oleh suatu bangsa dan Negara menuju modernisasi dalam kerangka pembinaan bangsa (nation building). Menurut Digdowiseiso (2019) pembangunan adalah suatu usaha untuk melangsungkan perubahan agar menjadi lebih baik. Perubahan yang dimaksud yaitu bergerak ke arah peningkatan dari situasi semula, tidak sedikit pula yang memperkirakan bahwa pembangunan ialah juga pertumbuhan.

Menurut Anggara & Sumantri (2016) tujuan pembangunan yaitu tujuan pembangunan ialah mewujudkan masyarakat yang sejahtera dalam segala aspek kehidupan dan tujuan pembangunan tidak memiliki batasan waktu untuk mencapai tujuan tersebut.

Menurut Mustanir & Abadi (2017) partisipatif adalah kontribusi atau keterlibatan masyarakat dalam proses

interaksi sosial, untuk mengetahui masalah dan potensi yang terdapat di masyarakat dalam kondisi tertentu, baik dalam pengambilan keputusan menyelesaikan masalah, pelaksanaan usaha menangani masalah, dan proses keikutsertaan masyarakat dalam menilai perubahan yang terjadi.

Menurut Suwandi (2012) implementasi perencanaan pembangunan partisipatif yaitu sebagai berikut: 1) Terfokus pada kepentingan masyarakat: a. Perencanaan program didasarkan pada masalah dan kebutuhan masyarakat, b. Perencanaan disiapkan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat yang memenuhi sikap saling percaya dan terbuka. 2) Partisipatoris (keterlibatan). Setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk mengungkapkan gagasan atau pemikiran melalui forum pertemuan, tanpa dibatasi oleh kemampuan bicara, waktu dan lokasi. 3) Sinergitas; a. Harus menjamin keterlibatan semua pihak, b. Selalu menekankan kerjasama antar wilayah administratif dan wilayah geografis, c. Setiap rencana yang akan dibangun semaksimal mungkin menjadi pelengkap dari rencana yang sudah ada, sedang dikembangkan, atau akan dibangun. Memperhatikan interaksi antar pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Menurut Kartikawanto (2013) perencanaan pembangunan partisipatif mempunyai karakteristik yaitu: 1) Penyelidikan dalam perencanaan pembangunan, 2) Proses perencanaan pembangunan suatu daerah harus dilaksanakan melalui forum musyawarah dengan melibatkan para seluruh unsur pelaku di wilayah setempat, 3) Daya dukung yang kuat untuk melaksanakan proses perencanaan pembangunan, 4) Perencanaan pembangunan disusun berdasarkan kenyataan yang terjadi di suatu daerah, dan 5) Merancang anggaran agar bias diketahui berapa biaya yang akan dibutuhkan dan digunakan.

Menurut Conyers (dalam Puspasari, 2013) ada tiga alasan utama pentingnya partisipatif dalam proses pembangunan yaitu: 1) Partisipasi masyarakat bisa menjadi “telinga” untuk mendapatkan informasi terkait situasi, permasalahan, dan kebutuhan masyarakat, 2) Efektivitas dan efisiensi rencana atau program pembangunan akan lebih mudah didapatkan, terutama dalam kondisi kontribusi masyarakat bisa mengurangi beban biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan pembangunan, dan 3) Partisipasi secara etik dan moral ialah hak demokratis masyarakat, oleh karena itu dengan partisipasi maksimal maka dengan

sendirinya pemerintah akan mengurangi potensi resistensi dan efek samping proses sosial terhadap pembangunan.

Ada beberapa keuntungan mengikutsertakan partisipatif dalam perencanaan pembangunan yaitu *Pertama*, pembangunan akan didasarkan pada kebutuhan masyarakat. *Kedua*, pembangunan berorientasi kepada masyarakat akan menciptakan stabilitas politik, karena masyarakat ikut serta dalam perencanaan pembangunan maka masyarakat dapat mengontrol pembangunan yang sedang berlangsung. Partisipatif dalam perencanaan pembangunan sangatlah menjadi hal yang penting untuk membantu pemerintah agar pembangunan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan masyarakat. Perencanaan partisipatif merupakan upaya masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya guna mencapai kondisi yang diharapkan secara mandiri sesuai dengan kebutuhannya.

Menurut Maryam & Dewi (2013) ada 7 (tujuh) ciri-ciri perencanaan pembangunan yang partisipatif yaitu:1) Konsep pembangunan partisipatif identik dengan kekuasaan masyarakat, dimana partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan sangat penting karena dapat menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab

masyarakat terhadap pembangunan. Oleh karena itu, untuk mencapai keberhasilan pembangunan, semua program perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan harus melibatkan masyarakat; 2) Masyarakat berpartisipasi aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan pembangunan dan bekerja sama dalam menjalankan pembangunan; 3) Laki-laki dan perempuan memiliki peran yang sama pada setiap tahap pembangunan dan menikmati manfaat kegiatan pembangunan secara adil; 4) Pengambilan keputusan pembangunan dilaksanakan secara musyawarah serta mufakat dengan senantiasa berorientasi terhadap kepentingan masyarakat miskin; 5) Masyarakat wajib mempunyai akses yang mencukupi terhadap seluruh informasi serta proses pengambilan keputusan sehingga pengelolaan kegiatan bisa dilakukan secara transparan serta dipertanggung jawabkan baik secara moral, teknis, sah ataupun administratif; 6) Tiap pengambilan keputusan wajib memikirkan kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak hanya disaat sekarang tetapi juga di masa yang akan datang dengan senantiasa melindungi kelestarian lingkungan; 7) Dalam menciptakan partisipasi, pemerintah sudah membentuk suatu forum yang digunakan untuk menyelenggarakan

perencanaan pembangunan yang biasa disebut Musrenbang.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, dengan tipe penelitian deskriptif kualitatif untuk menggambarkan suatu kejadian atau peristiwa maupun fenomena yang terjadi di lapangan. Dalam penelitian ini, informan ditentukan menggunakan *purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sample sumber data dengan pertimbangan tertentu yaitu orang yang memiliki pengetahuan yang luas serta mampu menjelaskan sebenarnya tentang masalah yang diteliti. Adapun jumlah informan sebanyak 11 (sebelas) orang.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer yang didapatkan langsung dari lapangan berupa hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan beberapa informan atau narasumber yang benar-benar berkompeten dan bersedia memberikan data dan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Data Sekunder yaitu data yang didapatkan dari bacaan seperti buku-buku, kajian pustaka, dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 1) Observasi; 2) Wawancara; dan 3)

Dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 1) Reduksi data; 2) Penyajian data; dan 3) Penarikan Kesimpulan.

Dalam pengabsahan data dari penelitian ini adalah Triangulasi. Triangulasi yaitu sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik dan sumber data yang ada. Triangulasi terbagi menjadi tiga bagian yaitu: 1) Triangulasi Sumber dilaksanakan dengan cara memeriksa data yang diperoleh dari berbagai sumber; 2) Triangulasi Teknik dilaksanakan dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda. Informasi atau data yang ditemukan melalui wawancara diperiksa dengan observasi dan dokumen; dan 3) Triangulasi Waktu yaitu dalam hal pengujian kredibilitas data dapat dilaksanakan dengan melakukan pengecekan melalui wawancara, observasi, atau teknik lain pada waktu atau situasi yang berbeda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk mengetahui sejauh mana perencanaan pembangunan berbasis partisipatif di Kelurahan Mario Pulana Kecamatan Camba Kabupaten Maros, penulis menggunakan 3 proses pelaksanaan perencanaan pembangunan partisipatif yang dikemukakan oleh

Suwandi (2012) yaitu terfokus kepada kepentingan masyarakat, partisipatoris, dan sinergitas.

Terfokus pada Kepentingan Masyarakat

Salah satu proses pelaksanaan perencanaan pembangunan partisipatif yaitu memperhatikan kepentingan masyarakat yang didasarkan pada kebutuhan dan masalah yang dihadapi masyarakat. Memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk berpartisipasi akan meningkatkan kemandirian dan kerjasama yang baik dari masyarakat.

Terfokus pada kepentingan masyarakat yaitu perencanaan pembangunan yang dilakukan untuk menemukan masalah atau kebutuhan, sehingga didapatkan daftar masalah, meliputi:

Identifikasi Masalah yang Dihadapi Masyarakat

Identifikasi masalah merupakan proses untuk menemukan, mengetahui dan mengumpulkan isu-isu atau persoalan yang dihadapi atau berkembang di masyarakat. Dalam proses ini, masyarakat menjadi faktor kunci karena mereka lah yang sebenarnya mengetahui apa permasalahan yang dihadapi. Oleh

karena itu, proses identifikasi masalah merupakan proses yang mengajak masyarakat untuk secara cermat mengidentifikasi permasalahan yang mereka hadapi.

Untuk mendapatkan permasalahan yang dihadapi masyarakat, Kelurahan Mario Pulana Kecamatan Camba Kabupaten Maros melakukan proses identifikasi masalah dengan mengadakan Musrenbang dan Rapat Koordinasi. Musrenbang diselenggarakan oleh pihak pemerintah Kelurahan Mario Pulana Kecamatan Camba Kabupaten Maros, sedangkan Rapat Koordinasi diselenggarakan oleh Kepala Lingkungan namun tetap berada dalam pengawasan Kelurahan dan kegiatan ini dilakukan sekali setahun karena merupakan bagian dari proses perencanaan pembangunan. Kegiatan identifikasi dimulai dari rapat koordinasi disetiap Lingkungan Kelurahan Mario Pulana, dengan mekanisme menghadirkan masyarakat untuk menggali, menemukan dan mengumpulkan permasalahan dan kebutuhan masyarakat secara menyeluruh yang kemudian diseleksi untuk dipilih mana masalah yang akan diajukan ke Musrenbang Kelurahan.

Sebelum penyeleksian kebutuhan dan masalah, terlebih dahulu dilakukan *review* terhadap kebutuhan dan masalah

yang diusulkan oleh masyarakat, ini ditujukan untuk mengetahui kebenaran dan validitas kebutuhan yang diusulkan masyarakat. Semua usulan yang diajukan akan dikumpulkan melalui daftar masalah dan setiap usulan akan diberikan nomor atau ranking berdasarkan skala prioritas usulan yang diajukan.

Namun terdapat permasalahan yang terjadi saat proses identifikasi masalah di Kelurahan Mario Pulana Kecamatan Camba Kabupaten Maros yaitu kegiatan rapat koordinasi yang menjadi sarana untuk melakukan identifikasi masalah kebutuhan masyarakat jarang diadakan oleh Kepala Lingkungan. Dan masyarakat tidak pernah mendapatkan informasi terkait dengan kegiatan yang akan dilakukan sehingga menjadi penghambat masyarakat hadir dalam kegiatan tersebut.

Terakomodasinya Kebutuhan Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan Musrenbang

Untuk memenuhi semua kebutuhan masyarakat dalam Musrenbang bukanlah suatu hal yang mudah. Dengan beragam usulan atau aspirasi yang diberikan masyarakat menjadi suatu tantangan yang harus

diputuskan oleh pemerintah dalam memutuskan daftar usulan rencana pembangunan yang akan dilakukan. Dengan terakomodasinya semua kebutuhan masyarakat dalam pengambilan keputusan tentunya akan berdampak baik untuk keberlangsungan pembangunan yang akan dilakukan.

Dalam pengambilan keputusan Musrenbang Kelurahan Mario Pulana Kecamatan Camba Kabupaten Maros, semua kebutuhan aspirasi masyarakat bisa terakomodasi dengan baik dan semua usulan yang disampaikan bukan hanya sekedar keinginan tetapi memang menjadi kebutuhan dari masyarakat.

Saat proses pelaksanaan Musrenbang Kelurahan kebutuhan masyarakat ditampung dan didengarkan oleh pihak penyelenggara yaitu aparat pemerintah Kelurahan Mario Pulana, sehingga dalam pengambilan keputusan terjadi kesesuaian antara kebutuhan masyarakat yang diaspirasikan melalui usulan dengan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat.

Semua proses saat Musrenbang Kelurahan dilakukan dengan terbuka kepada masyarakat dan semua usulan diberikan solusi agar dapat terakomodir dengan baik. Hal ini perlu dilakukan agar semua proses pelaksanaan bisa mengajak masyarakat untuk terlibat

dalam segala tahapan Musrenbang sehingga usulan yang menjadi daftar program kegiatan memang benar berdasarkan pada masalah yang dihadapi masyarakat.

Partisipatoris

Mengikutsertakan masyarakat dalam setiap kegiatan perencanaan pembangunan adalah hal yang harus dilakukan. Setiap masyarakat melalui forum pertemuan harus memperoleh peluang yang sama dalam memberikan sumbangan pikiran, tenaga ataupun materil tanpa dihambat oleh kemampuan berbicara, tempat dan waktu yang meliputi:

Keterlibatan Pada Setiap Tahapan Musrenbang

Dalam setiap Musrenbang, masyarakat harus dilibatkan pada setiap tahapan yang ada karena masyarakat mempunyai hak untuk terlibat langsung dalam setiap proses tahan Musrenbang. Sesuai dengan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maros Nomor 2 Tahun 2005 tentang Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Terpadu Kabupaten Maros, pada Pada 8 huruf g bahwa merupakan hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan daerah.

Pada proses Musrenbang di Kelurahan Mario Pulana Kecamatan Camba Kabupaten Maros, masyarakat sudah dilibatkan dalam setiap tahapan perencanaan, pelaksanaan, sampai tahap pengawasan melalui undangan yang diberikan oleh pihak penyelenggara Musrenbang. Keterlibatan Masyarakat Kelurahan Mario Pulana juga sudah aktif mengikuti setiap proses tahapan, dengan sangat antusias memberikan aspirasinya mengenai permasalahan yang ada di lingkungannya.

Namun yang menjadi kendala adalah kehadiran masyarakat yang masih sedikit sehingga menyulitkan pemerintah dalam mencari tahu apa sebenarnya masalah yang dihadapi oleh masyarakat.

Pemberian Usulan/Saran dalam Perencanaan Pembangunan

Bentuk partisipasi masyarakat dalam memberikan usulan atau ide dalam Musrenbang dengan mengajukan usulan terkait dengan permasalahan yang dihadapi di lingkungan masyarakat. partisipasi dengan memberikan usulan atau ide mempunyai tujuan untuk menyusun program maupun untuk memperlancar pelaksanaan program usulan dan juga untuk mewujudkan pengalaman agar dapat mengembangkan kegiatan yang diikutinya.

Pemberian usulan atau ide dari masyarakat Kelurahan Mario Pulana Kecamatan Camba sangat beragam, mulai dari usulan tentang pembangunan fisik dan pembangunan non fisik. Usulan pembangunan fisik umumnya bersifat infrastruktur atau prasarana, sedangkan usulan pembangunan non fisik umumnya merupakan jenis pembangunan yang tercipta oleh dorongan masyarakat setempat.

Berdasarkan data sekunder yang didapatkan peneliti yaitu daftar usulan pembangunan hasil Musrenbang Kelurahan Mario Pulana Tahun 2021, terdapat 8 usulan pembangunan fisik hasil musrenbang dan 2 pembangunan non-fisik hasil musrenbang. Dari hasil usulan dapat dikatakan bahwa usulan pembangunan fisik yang diaspirasikan masyarakat lebih dominan ketimbang usulan pembangunan non fisik.

Walapun tidak terlibat langsung dalam Musrenbang yang dilakukan di Kantor Lurah, akan tetapi sebagian masyarakat tetap berusaha untuk berpartisipasi dengan memberikan usulan atau pendapat yang disampaikan kepada Kepala Lingkungan yang nantinya akan menyampaikan pendapat masyarakat di forum rapat atau musyawarah.

Pemberian Bantuan Tenaga/ Material Izin dalam Kegiatan Perencanaan Pembangunan

Pemberian bantuan tenaga atau material dalam Musrenbang merupakan jenis partisipasi masyarakat dengan mendayagunakan seluruh tenaga dan sumbangan materi yang dimiliki secara kelompok maupun individu untuk mencapai sesuatu yang diinginkan.

Partisipasi tenaga yang diberikan dalam perencanaan pembangunan berupa pertolongan dalam bentuk tenaga kepada orang lain guna mencapai program yang diinginkan. Sedangkan partisipasi materil yang diberikan dalam perencanaan pembangunan berupa uang serta makanan diberikan kepada orang lain dalam kegiatan perencanaan pembangunan. Dengan adanya bantuan tenaga atau materil diharapkan masyarakat dalam ikut serta dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, masyarakat Kelurahan Mario Pulana Kecamatan Camba Kabupaten Maros selalu membantu pemerintah dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan dengan memberikan bantuan tenaga atau meteril yang berupa menghibahkan tanah milih masyarakat untuk membangun jalan tani, sumbangan uang untuk pembangunan mushollah dan

saat ada kegiatan Musrenbang tokoh masyarakat membantu untuk mengajak masyarakat untuk terlibat dalam Musrenbang.

Masyarakat ikut melakukan pemberian tenaga atau meteril dengan kesadaran mereka sendiri demi membangun Kelurahan Mario Pulana lebih baik dan untuk meningkatkan hubungan yang baik antara masyarakat dan pemerintah.

Sinergitas

Sinergitas yaitu terjadinya kesatuan tindakan dari setiap *stake holder* yang terlibat dalam kegiatan Musrenbang mulai dari tingkat pemerintah kecamatan, pemerintah kelurahan dan masyarakat dalam setiap kegiatan Musrenbang yang meliputi:

Kesepakatan antara Pemerintah dan Masyarakat dalam Mengakomodasi Aspirasi Masyarakat

Kesepakatan yang terjadi antara pemerintah dan masyarakat Kelurahan Mario Pulana Kecamatan Camba Kabupaten Maros dalam mengakomodasi aspirasi masyarakat, pemerintah dan masyarakat melakukan dua kesepakatan dalam memilih kegiatan prioritas yakni kegiatan prioritas untuk kelurahan sendiri yang dibiayai dari dan kelurahan atau

alakosi dana masyarakat dan kegiatan prioritas yang akan diusulkan melalui Musrenbang Kecamatan yang biayanya itu dari APBD Kabupaten/Kota. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi jika ada usulan yang belum diakomodir di tingkat kecamatan, jadi usulan yang dijadikan kegiatan untuk kelurahan sendiri dapat dilakukan dengan menggunakan dana kelurahan dan alakosi dana masyarakat. Selain menyepakati dua kegiatan, pemerintah dan masyarakat Kelurahan Mario Pulana juga melakukan kesepakatan mengenai anggaran setiap kegiatan yang diusulkan.

Kesepakatan yang terjadi dalam Musrenbang Kelurahan Mario Pulana juga untuk menentukan tim delegasi yang terdiri dari 2-3 orang perwakilan masyarakat dan 3 orang dari aparat kelurahan untuk mewakili hadir pada saat Musrenbang Kecamatan. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan Arnstein (dalam Sigalingging, 2014) bahwa kesepakatan dilakukan bersama antara pemerintah dan masyarakat yang disepakati juga pembagian tanggungjawab mulai dari tahapan perencanaan, pengendalian keputusan dan penyusunan kebijakan sampai akhir. Setelah adanya kesepakatan, maka tidak dibenarkan adanya perubahan-perubahan yang dilakukan secara sepihak. Hasil kesepakatan antara pemerintah dan

masyarakat Kelurahan Mario Pulana juga berdasarkan kerjasama semua pihak agar menghindari kesalahpahaman antara pemerintah dan masyarakat terkait keputusan yang disepakati.

Usulan Masyarakat dalam Musrenbang Diakomodir Sampai Tingkat Kecamatan

Sinergitas perencanaan pembangunan dapat dilihat dari proses usulan masyarakat dalam keputusan Musrenbang Kelurahan diakomodir sampai tahap Musrenbang Kelurahan, namun tentunya harus selalu menekankan kerjasama, serta interaksi diantara *stakeholders*. Terkadang forum yang melibatkan masyarakat hanya terbatas pada musyawarah perencanaan pembangunan kelurahan, representasi masyarakat dalam forum-forum di tingkat kecamatan sangat kecil, ini menyebabkan banyaknya usulan program masyarakat yang hilang di tengah jalan.

Inilah yang terjadi pada usulan program yang telah disepakati bersama dalam Musrenbang Kelurahan Mario Pulana Kecamatan Camba, usulan masyarakat dalam Musrenbang masih banyak yang belum diakomodir di tingkat kecamatan, disebabkan di tingkat kecamatan banyak usulan-usulan yang

masuk dari desa atau kelurahan-kelurahan lain dan usulan-usulan yang telah masuk itu akan diseleksi kembali untuk disesuaikan dengan prioritas usulan dari SKPD terkait. Sehingga pada prosesnya banyak usulan masyarakat yang belum diakomodir di tingkat kecamatan. Pada tahun 2021, hanya satu usulan masyarakat dari Kelurahan Mario Pulana yang dapat diakomodir yaitu pembangunan jalan tani.

Setiap usulan yang diajukan ke tingkat kecamatan akan diinformasikan kepada masyarakat di masing-masing kelurahan dan jika ada usulan yang belum diakomodir, maka akan direncanakan untuk bahan pembahasan pada perencanaan pembangunan selanjutnya.

KESIMPULAN

Terfokus pada kepentingan masyarakat, bahwa terpenuhinya semua usulan yang diberikan masyarakat dalam Musrenbang Kelurahan dan identifikasi masalah yang dilakukan melalui Musrenbang sudah berjalan dengan baik, namun pada Rapat Koordinasi belum terlaksana dengan baik disebabkan kegiatan jarang diadakan oleh Kepala Lingkungan.

Partisipatoris, bahwa masyarakat selalu dilibatkan pada setiap proses kegiatan perencanaan pembangunan dan

keterlibatan masyarakat Kelurahan Mario Pulana dalam Musrenbang dengan mengutarakan usulan, pendapat, ide sudah aktif bahkan bantuan dari segi tenaga/materil yang diberikan pada saat musrenbang berlangsung juga diberikan masyarakat dengan sukarela. Namun kehadiran masyarakat masih menjadi kendala, karena masyarakat yang hadir pada saat Musrenbang masih sangat minim sehingga menyulitkan pemerintah dalam mencari tahu permasalahan atau kebutuhan atau yang dihadapi oleh masyarakat.

Sinergitas, bahwa terjadinya kesepakatan antara pemerintah dan masyarakat dalam mengakomodasi aspirasi yang diberikan masyarakat dengan melakukan dua kesepakatan dalam memilih kegiatan prioritas yakni kegiatan prioritas untuk kelurahan sendiri dan kegiatan prioritas yang akan diusulkan melalui Musrenbang Kecamatan. Namun, di tingkat kecamatan masih banyak usulan yang belum diakomodir dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, S., & Sumantri, I. (2016). *Administrasi Pembangunan: Teori dan Praktik*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Digdowniseiso, K. (2019). *Teori Pembangunan*. Jakarta Selatan: Lembaga Penerbitan Universitas Nasional (LPU-UNAS).
- Dolong, J. (2016). Sudut Pandang Perencanaan Dalam Pengembangan Pembelajaran. *Jurnal Inspiratif Pendidikan, Vol 5*.
- Kartikawanto, I. (2013). Perencanaan Pembangunan Partisipatif Di Kelurahan Dan Desa. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik, Vol. 14(4)*.
- Karyoto. (2016). *Dasar-Dasar Manajemen - Teori, Definisi dan Konsep*. Yogyakarta: Penerbit ANDI
- Maryam, & Dewi. (2013). Perencanaan Pembangunan Partisipatif Di Kelurahan Dan Desa. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik, Vol. 14*.
- Mustanir, A., & Abadi, P. (2017). Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Di Kelurahan Kanyuara Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang. *Jurnal Politik Profetik, 5(2)*, 247–261.
- Puspasari, A. A. (2013). Perencanaan Partisipatif Dalam Pembangunan Daerah. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 3*.
- Suwandi. (2012). Perencanaan Pembangunan Partisipatif Di Desa Surakarta Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon. *Journal of Public Policy and Management Review, Vol 1*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maros Nomor 2 Tahun 2005 tentang Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Terpadu Kabupaten Maros.